

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adatistiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit, (Widjaja Haw, 2003:04).

Implikasi dari terbentuknya Desa dengan sifat yang demikian diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat yang dapat dilihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintahan untuk membentuk kelembagaan Desa yang lebih maju dan salah satunya melalui aspek ekonomi.

Dalam jurnal Fakultas ilmu hukum Unila *Zulkarnain Ridlwan* mengatakan bahwa : UU Desa dalam rangka mengembangkan aspek ekonomi Desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki Desa. Meskipun subtansi mengenai badan usaha milik Desa (BUMDes) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan Desa. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oelh pemerintahan Desa dan masyarakat

Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuannya sendiri.

Sehingga keberadaan Desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, Desa merupakan basis system kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis. Sehingga Desa merupakan miniatur dan sample yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antar pemerintah dengan masyarakatnya (*JAP, Vol. 1, no. 6, Hal. 1069*). Dan melalui Desa inilah badan usaha milik Desa dapat diselenggarakan dengan mengacu pada peraturan Desa yang didasarkan pada peraturan daerah.

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di peDesaan. Aset ekonomi yang ada di Desa seharusnya dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa. Subtansi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli Desa. Dengan adanya kehadiran BUMDes ini sendiri akan menjadi pangkal bagi kekuatan Desa untuk mengembangkan sumberdaya alam yang telah dimiliki Desa untuk mampu mengembangkan perekonomian Desa. Dan diharapkan BUMDes juga dapat mampu

memggerakan dinamika ekonomi Desa dan dapat sebagai suatu perusahaan Desa.

Namun didalam operasionalnya BUMDes Mekar Sari masih terkendala oleh sumberdaya manusianya serta minat para masyarakatnya untuk ikut mengelola dan mengembangkannya, juga semakin meningkatnya apatisme masyarakat terhadap badan usaha milik Desa ini. Seperti yang dialami oleh BUMDes Desa Morosari, Badan usaha milik Desa ini pada awal – awalnya bisa dikatakan berkembang pesat didalam pengembanganya meskipun pada awal pendirianya hanya bergerak pada bidang persewaan barang. Seiring berjalanya waktu konsistensi para anggota pengelola bidang persewaan tersebut mulai kendor semangatnya dan tidak konsisten didalam pengelolaanya.

Keberadaan BUMDes Mekar Sari Desa Morosari ini diharapkan dapat mendukung didalam peningkatan perekonomian masyarakat desa dengan munculnya kembali demokrasi sosial di Desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat Desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan serta partisipasi masyarakat terhadap BUMDes sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan keberadaan BUMDes dapat berperan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa. Di sisi lain upaya pemerintahan Desa juga harus mampu berpola pikir kreatif serta inovatif didalam mendominasi kegiatan ekonomi Desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat mengembangkan perekonomian Desa serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan dapat mengelola sumberdaya alam Desa yang ada.

Selanjutnya, BUMDes dapat berdiri dengan dengan tujuan sebagai agen pembangun daerah dan menjadi pendorong terciptanya sektor korporasi di peDesaan dengan biaya produksi dan pengelolaan yang tidak terlalu tinggi biayanya.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Morosari Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana upayan Badan Usaha Milik Desa didalam meningkatkan perekonomian Desa di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitiaan ini adalah diantaranya :

1. Secara Teoritis, hasil penelitiaan ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran berupa hasil teori – teori yang berkaitan dengan upaya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

2. Secara praktis, penelitian ini nantinya dapat diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak – pihak yang membutuhkannya, terutama bagi instansi serta lembaga pemerintahan.
3. Manfaat bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan terkait tentang proses peningkatan perekonomian Desa yang khusus nya telah dilakukan oleh BUMDes Mekar Sari Desa Morosari.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah yaitu merupakan definisi konseptual untuk memberikan dan memperjelas arti istilah-istilah yang diteliti secara konseptual dan atau sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia agar tidak salah didalam menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti antara lain :

a. Upaya

Upaya merupakan usaha untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Upaya yang dimaksud disini adalah upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa melalui keberadaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam konteks ini upaya yang dimaksud yaitu adalah berkaitan dengan upaya Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan ekonomi

desa. Upaya yang dimaksud yaitu berupaya terhadap ekonomi yang ada diDesa. Sejauh mana upaya yang sudah dilakukan Badan Usaha Milik Desa tersebut terhadap perekonomian masyarakat desa yang dapat dilihat dengan pengimplikasiannya yaitu dengan melihat seberapa besar prosentase kontribusinya terhadap pemasukan Pendapatan Asli Desa.

b. Badan Usaha Milik Desa

Badan usaha milik Desa merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintahan Desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintahan Desa dan masyarakat. Badan usaha milik Desa dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintahan Desa dan masyarakat secara keseluruhan, (Eko Sutoro, 2014 : 250)

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007; 04) menyebutkan bahwa yang di maksud dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga Usaha milik Desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, dalam upaya untuk memperkuat perekonomian Desa dan pembentukanya berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa.

c. Meningkatkan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke empat(2012 : 662), kata me.ning.kat.kan berarti menaikkan (derajat, taraf, dan sebagainya); mempertinggi memperhebat (produksi dan sebagainya).

d. Perekonomian

Perkonomian menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu tindakan (aturan atau cara) berekonomi, ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan);pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga;tata kehidupan perekonomian (suatu negara);cak urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara);

Bentuk perusahaan perdagangan secara modern dalam bentuk perusahaan yang dilakukan secara besar-besaran dengan ciri seperti harga barang tetap ditentukan menurut perhitungan besarnya modal dan segala pembiayaan untuk produksi, standardisasi barang, peniadaan tindakan tawar-menawar harga, dan penggunaan iklan untuk penawaran kepada khalayak;tunggal perekonomian suatu bangsa atau kawasan yang sangat bergantung hanya pada suatu kegiatan sehingga sangat peka terhadap perubahan yang mempengaruhi produksi dan pemasaran komoditasnya.

e. Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2010 menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (PERMENDAGRI NO.30 TH 2010).

F. Landasan Teori

Setiap penelitian memerlukan sebuah perumusan sesuai dengan apa yang telah dikaji didalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merumuskan teori sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Demimemperkuat penelitian yang dilakukan, peneliti telah merumuskan dasar teori yang berkaitan dengan judul tema. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Badan Usaha Milik Desa

a. Definisi Badan Usaha Milik Desa

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam hal perencanaan dan

pembentukan, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari yaitu *member base* dan *self help*.

Hal ini sangat penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar disarankan pada kemauan masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*) baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Rahardjo dan Ludigdo, 2006: 84).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bawasanya berdirinya Badan usaha Milik Desa dikarenakan sudah mendapatkan amanat bawasanya didalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desapemerintahan Desamendirikan badan usaha milik Desa. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi komersiil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor riil dan lembaga keuangan berlaku sebagai LKM (Rahardjo dan Ludigdo, 2006 : 84).

Badan Usaha milik Desa berbeda dengan badan usaha yang lainnya pada umumnya. Terdapat beberapa ciri yang

membedakan BUMDes dengan lembaga kemersil yang lainnya menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (di dalam kutipan Ridlwan, 2014 : 431) yaitu :

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh Desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari Desa (51%) dan dari masyarakat (49%), melalui penyertaan modal saham atau andil;
3. Operasionalisasinya menggunakan suatu falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada petensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) serta masyarakat melalui kebijakan Desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemrov, Pemkab, dan Pemdes; dan
7. Pelaksanaan operasionalisasinya dikontrol secara bersamaan (Pemdes, BPD, Anggota)

BUM Desa sebagai suatu badan usaha yang diharapkan bisamemberikan pendapatan terhadap Desa. Dalam undang-undang Desa dimandatkan bahwa hasil dari usaha BUM Desa bisa digunakan untuk pengembangan usaha

dan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan yang bergulir, yang ditetapkan pada APBDes.

BUM Desa sebagai pilar kegiatan ekonomi di Desa berfungsi sebagai 2 hal, yaitu lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berkontribusi langsung terhadap masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial, BUM Desa memiliki tujuan untuk mencari keuntungan lewat barang dan jasa yang ditawarkan. Dalam pengelolaan BUM Desa, prinsip, efisien, dan efektif perlu diterapkan. BUM Desa dibentuk sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat Desa. Pendirian BUM Desa memperhatikan kondisi baik karakteristik lokal yang dimiliki Desa maupun potensi dan sumber dayanya. Sehingga keberadaan BUM Desa bisa bermacam-macam di Indonesia. Lebih lanjutnya BUM Desa diatur oleh pemerintahan Daerah. (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007 ; 3)

b. Maksud dan Tujuan Pendirian BUM Desa

Dalam beberapa tahun belakangan keberadaan BUM Desa hadir sebagai ikon baru setelah Alokasi Dana Desa (ADD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang ketiganya ada dalam peraturan pemerintahan nomor 72 tahun 2005. (Eko et al, 2014:249). Pendirian BUM Desa sebagai suatu usaha kolektif di Desa mempunyai beberapa maksud dan tujuan. Keberadaan BUM Desa diharapkan selain dapat berkontribusi ke Desa juga mampu melayani masyarakat. Pendirian BUM Desa dimandatkan dari Undang-undang Desa dimaksud untuk menampung kegiatan pada bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang pengelolannya dilakukan oleh Desa atau bekerja sama dengan antar Desa.

Sedangkan tujuan didirikannya BUM Desa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:5) adalah :

1. Meningkatkan perekonomian Desa,
2. Meningkatkan pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
4. Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Dalam pendiriannya sudah dijelaskan bahwa modal BUM Desa bisa berasal dari Desa dan masyarakat. Sedangkan

untuk struktur organisasinya pengelola BUM Desa berbeda dengan organisasi pemerintahan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa sendiri terdiri dari penasehat yang dijabat oleh kepala Desa secara *ex officio*, pelaksana operasional dan pengawas. Kepemilikan BUM Desa tidak hanya dimiliki oleh Desa saja akan tetapi dimiliki oleh Desa dan bersama dengan masyarakat Desa.

c. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Sebagai suatu wadah usaha yang dimiliki oleh Desa, dalam mengelola BUM Desa terdapat beberapa prinsip yang bisa dilaksanakan. Pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa ini bisa di perhatikan secara bersamaan antara pemerintahan Desa beserta pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Prinsip tersebut disebutkan dalam Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007 : 12-13) sebagai berikut :

1. *Kooperatif* , Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelngsungan hidup usahanya.
2. *Pertisipatif* ,Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus tersedia secara suka rela atau diminta

memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.

3. *Emansipatif* , semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. *Transparan* , Aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. *Akuntabel* , Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

6. *Sustainabel* , Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut diharapkan BUM Desa dapat berkembang dan berjaya secara maksimal, serta dapat berkontribusi secara maksimal didalam mengembangkan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat Desa.

d. Pengawasan dan Pertanggungjawaban BUM Desa

Sebagai sebuah badan usaha yang dimiliki oleh Desa, maka didalam pengembangannya diperlukan sebuah

pengawasan dan pertanggungjawaban didalam pengelolaan BUM Desa. Sesuai dengan yang telah dimandatkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dawasanya didalam melaksanakan pengawasan dapat dibentuk Bdan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pengawas Internal. Dimana dalam proses pembentukannya dilakukan dalam musyawarah Desa , serta pengawasan tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar selalu bisa memantau bagaimana perkembangan kinerja BUM Desa kedepanya.

Sedangkan untuk pertnggungjawaban BUM Desa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007: 45) mekanismenya yaitu manajer dari setiap unit BUM Desa bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris, penyampaian laporan pertanggungjawabannya dilakukan pada akhir periode lewat permusyawarahan Desa. Segala mekanisme maupun tata tertibnya dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Untuk laporan pertanggungjawaban sendiri berisi beberapa hal, antara lainnya yaitu Laporan Kinerja Pengelolaan pada satu periode, kinerja usaha terkait dengan realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dan sebagainya.

Laporan keuangan yang meliputi Rencana Pembagian Laba Usaha, Serta rencana pengembangan yang belum terealisasi.

2. Konsep Manajemen Strategi

Menurut Ismail Sholihin (2012) yang dikutip dalam Wheelen dan Hunger(2004 : 2) dijelaskan bahwa, Manajemen strategi (*Strategic Manajemen*) merupakan serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang dihasilkan dari proses formulasi dan implementasi rencana dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Bila definisi ini dikaitkan dengan terminologi “manajemen”, maka manajemen strategis dapat pula di definisikan sebagai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif.

Sedangkan menurut Sukanto (2003 : 41) Strategi adalah fondasi tujuan organisasi dan pola gerak pendekatan manajemen mencapai tujuan. Strategi adalah rencana menyatu, komprehensif dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategis badan usaha dengan kesempatan serta ancaman yang datang dari luar. Strategis dapat dikelompokkan dalam (1) tumbuh, (2) stabilitas, dan (3) pengurangan. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah :

- a. Analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman.
- b. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
- c. Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.

Manajemen strategi dilingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumberdaya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalan sumber-sumber keuangan pemanfaatan dana yang diperoleh dari masyarakat dengan cara yang paling efisien dan efektif. Dengan definisi tersebut strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara dengan saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Sehingga strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumberdaya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasaran melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dengan kondisi yang paling menguntungkan (winarto, 2014 : 41) .

Dengan konsep manajemen strategis inilah pada akhirnya akan dijadikan sejumlah alternatif strategis didalam pengelolaan

BUMDes Mekar Sari Desa Morosari Kecamatan Sukorejo, dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

3. Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. (Widjaja, Haw 2003 : 6)

Otonomi desa merupakan suatu peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) bagi pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi desa dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta efisien dan berwibawa, guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Otonomi desa sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori *areal devision of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal

(Nugroho, 2000 : 36). Dengan demikian otonomi desa memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi yang ada di desa tersebut.

Konsekuensinya desa harus mampu secara mandiri didalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, maka semakin tinggi pula tingkat otonomi desa. Sebab tidaklah efektif bila desa yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pada pemerintahan pusat. Sehingga dapat dikatakan otonomi merupakan salah satu strategi dalam suatu proses pembangunan guna menghadapi berbagai hambatan baik institusi maupun administrasi. Otonomi harus mampu menggali potensi yang ada di desa guna untuk mencapai suatu tujuan. Berupa percepatan pembangunan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan tentang cara mengukur masing – masing variabel penelitian dengan menggunakan beberapa indikator. Definisi Operasional Upaya Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di desa

Morosari Kecamatan Sukorejo adalah bagaimanakah upaya Peningkatan perekonomian masyarakat Desa dengan dilihat dari :

1. Badan Usaha Milik Desa

Dalam hal ini, Badan Usaha Milik Desa yang dijadikan penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari Desa Morosari. Dimana Badan Usaha Milik Desa Mekar Sari ini berdiri pada tahun 2014 sekitar selama 4 tahun Badan Usaha Milik Desa tersebut berdiri. Dimana dua tahun pertama semenjak berdirinya masih dalam proses perintisan dan dua tahun belakangan ini mulai berkembang. Dengan diketahuai pada tahun pertama pendiriannya BUMDes tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Dimana masih pembentukan struktur organisasi yang ada didalamnya. Untuk tahun ke-dua dimana BUMDes mulai mendirikan unit usaha yang bergerak dibidang persewaan, yaitu berupa persewaan molem serta persewaan terop. Ditahun ke-tiga unit usaha persewaan tersebut mulai berkembang. Dan ditahun ke-empat BUMDes Mekar Sari mulai menambah unit usaha baru yaitu unit usaha keripik serta unit usaha Depo Air isi ulang.

Adapun indikator-indikator dalam variabel terkait tentang upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Sari Desa Morosari, dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

- a. Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

- b. Penyedia kebutuhan masyarakat

2. Perekonomian Masyarakat Desa

Dalam penelitian ini, Perekonomian Masyarakat Desa yang dimaksud adalah bagaimana kondisi perekonomian Desa Morosari dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Mekar sari. Dimana yang dimaksud dengan perekonomian masyarakat desa sesudah dan sebelum adanya Badan Usaha Milik Desa ini. Apakah dengan kehadiran Badan Usaha Milik Desa tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Serta seberapa berkontribusinya Badan Usaha Milik Desa dalam memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Desa.

Adapun indikator-indikator dalam variabel terkait tentang meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, dapat diukur dari indikator sebagai berikut :

- a. Peningkatan peluang usaha dan kelancaran roda perekonomian masyarakat
- b. Kemudahan akses pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodelogi penelitian digunakan dalam suatu penelitian ilmiah karena mempunyai suatu kedudukan yang penting didalamnya. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat tercapai dengan benar dan sesuai dengan prosedurnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip dalam buku Lexy J. Moleong (2013 : 04) mengartikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, data – data tersebut dapat berupa kata – kata tertulis atau lisan dari beberapa orang, dan perilaku yang diamati.

Sumber dari penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data utama (primer) adalah kata-kata dan tindakan orang yang sedang kita amati atau wawancarai. (Ibrahim, 2015: 69). Sedangkan data tambahan (skunder) menurut Moleong (2006: 129) yang dikutip ibrahim (2015; 70) menyebutkan bahwa meskipun dokumen sebagai sumber kedua, tetapi tidak bisa diabaikan dalam peneltiian, terlebih dokumen tertulis misalkan buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Data – data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan deskripsi terkait kejadian maupun keadaan yang akan diteliti dalam hal upaya Badan Usaha Milik Desa didalam meningkatkan perekonomian di Desa Morosari kecamatan Sukorejo.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Desa Morosari Kecamatan Sukorejo. Desa ini telah memiliki Badan Usaha Milik Desa yang berdirinya sekitar kurang lebih 4 tahun.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang atau sekelompok orang yang dapat memberikan informasi terhadap hal – hal yang diteliti. Dalam sebuah penelitian, informan digunakan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi sosial terhadap masalah yang akan diteliti dalam sebuah penelitian ilmiah.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling* (pengambilan sample berdasarkan tujuan), dimana dalam teknik ini siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti. Jadi pengumpulan data yang telah diberikan penjelasan oleh peneliti akan mengambil siapa saja yang menurut pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti (Irwan Soehartono, 2011: 63)

4. Teknik Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data yang sesuai akan mempermudah penulis didalam menyajiakan serta mengungkap sbuah permasalahan yang akan diteliti didalam sebuah penelitian. Dalam

penjabaran sebelumnya sudah dijelaskan bawasanya peneliti menggunakan metode teknik penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam mengumpulkan data. Hendaknya diingat, bahwa maksud wawancara ialah untuk menemukan apa yang ada didalam pikiran orang yang diwawancarai, apa yang dipikir, apa yang dirasakan. Wawancara dilakukan untuk menemukan suatu yang tidak dapat di pantau, seperti perasaan, pikiran, keinginan alasan, lapar dan sebagainya. Maka wawancara yang dilakukan harus memperhatikan berbagai aspek seperti waktu, kebiasaan, tempat, pribadi, lingkungan, etika dan sebagainya, supaya data yang diharapkan dapat diperoleh dengan mudah dan benar (Soehadi Sigit,2003:235).

b. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan lebi sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pernyataan – pernyataan (Irwan Soehartno, 2011:69)

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

5. Analisis Data

Pada intinya analisis dilakukan dengan membuat sintesis dari informasi – informasi yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam deskriptif yang *coherent* (yang berjalanan) mengenai yang peneliti amati atau yang ditemukan. Hipotesis tidak diuji seperti halnya pada penelitian eksperemental atau kuasi – eksperimental. Statistik deskriptif seperti presentase mungkin digunakan, bilamana hal itu dapat menggambarkan atau memberi penjelasan secara rinci tentang fenomena yang diselidiki. Analisis data dalam penelitian kualitatif menyandarkan pada diskripsi. Meskipun statistik tertentu digunakan sebagai hitungan, yang digunakan ialah statistik deskriptif bukannya yang inferensial (Soehardo Sigit, 2003: 232).